

# KERJA SAMA DENGAN BELANDA, ANRI SELENGGARAKAN WORKSHOP ON SYSTEMATIC DEPOT REGISTRATION



Peserta *Workshop on Systematic Depot Registration* menyimak materi yang disampaikan Prof. Charles Juergens

**JAKARTA, ARSIP** - Sebagai salah satu tindak lanjut kerja sama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan National Archives of the Netherland (NAN), pada 21 s.d 24 Januari 2014 ANRI melaksanakan “Workshop on Systematic Depot Registration” yang diikuti lima puluh satu orang pegawai ANRI. Workshop dilaksanakan di Ruang Serba Guna Soemartini, lantai 2, gedung A, ANRI dan dibuka secara langsung oleh Kepala ANRI yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Dr. Andi Kasman. Bertindak sebagai narasumber, guru besar dari Universitas Leiden, Prof. Charles Juergens.

Dalam sambutan Kepala yang disampaikannya, Andi mengungkapkan bahwa *workshop* ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di kedua lembaga pemerintahan pada umumnya, dan dalam upaya mendukung dan meningkatkan kegiatan konservasi arsip di ANRI pada khususnya. “Dalam *workshop* ini akan dibahas aspek-aspek dan relasi antarfungsi dalam *archival plan*, registrasi lokasi dan fisik arsip di depot penyimpanan secara sistematis, dan dilanjutkan dengan praktek lapangan di depot penyimpanan arsip,” paparnya.

Di awal penyampaian materinya,

Juergens pun menerangkan bahwa registrasi arsip di depot secara sistematis ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pendayagunaan arsip statis. Peserta pun diajak untuk berdiskusi dan praktik tentang hal-hal yang berkaitan dengan registrasi arsip di depot secara sistematis. (TK)

## KEPALA ANRI : “PERANAN ARSIPARIS AKAN SEMAKIN STRATEGIS”



Kepala ANRI Mustari Irawan didampingi Kapusdiklat Kearsipan M. Imam Mulyantono berfoto bersama dengan peserta diklat

**BOGOR, ARSIP** - “Pada masa sekarang dan yang akan datang seorang arsiparis akan memainkan peranan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan saat menyampaikan materi Kebijakan Kearsipan Nasional pada Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Pusdiklat) ANRI Bogor.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa jabatan fungsional arsiparis bisa menjadi jabatan yang sangat menarik karena peranan seorang arsiparis semakin luas dan penting mengikuti perkembangan lingkungan, baik lingkungan global maupun lingkungan nasional. Secara global datangnya era ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015, dimana apabila AEC

tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN.

Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Peluang inilah yang harus ditangkap oleh para arsiparis untuk bisa bersaing dengan sumber daya manusia di negara ASEAN lainnya. Sebab kalau tidak menangkap peluang ini, maka bukan tidak mungkin SDM dari negara lainnya akan mengambil alih peran arsiparis yang ada di Indonesia.

Disisi lain reformasi birokrasi memberikan tantangan tersendiri bagi pegiat dibidang kearsipan termasuk arsiparis untuk lebih membenahi diri dengan terus meningkatkan

kompetensi di bidang kearsipan dalam mendukung penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and Good Governance*) dengan penyelenggaraan tata kelola kearsipan yang menunjang proses akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam semua aspek kehidupan, ujar Kepala ANRI di hadapan 30 orang peserta diklat yang akan berlangsung dari tanggal 17 s.d 27 Maret 2014.

Diklat yang dibuka oleh Kepala Pusdiklat Kearsipan M. Imam Mulyantono ini merupakan diklat perdana yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kearsipan ANRI memasuki tahun anggaran 2014. Tahun ini (2014) Pusdiklat Kearsipan ANRI menyelenggarakan 15 kali diklat baik diklat fungsional maupun diklat teknis, disamping diklat kerjasama dengan instansi pusat dan daerah.(MI)

# PUTARAN BERIKUTNYA SELEKSI TERBUKA CALON PEJABAT ESELON IA ANRI

**JAKARTA, ARSIP** - Seleksi terbuka Pejabat Eselon Ia Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali digelar. Kali ini masing-masing kandidat harus mempresentasikan makalahnya di depan Kepala ANRI, Para Pejabat Eselon I dan Para Pakar, Sabtu, 15 Maret 2014 di Ruang Rapat Pimpinan ANRI Gedung C lantai 4 yang di mulai tepat pukul 09:00 WIB.

Peserta diwajibkan menyampaikan presentasi dengan tema “Reformasi Penyelenggaraan Kearsipan Dalam Rangka Mewujudkan Good Government dan Mengangkat Marwah Bangsa”. Dengan judul presentasi yang berbeda-beda, mereka dengan semangat menyampaikan ide dan buah pikirannya untuk menjadikan ANRI yang lebih baik di hadapan Tim Penilai yang dipimpin langsung oleh Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA dan Penilai lainnya : Tasdik Kinanto, SH., M.Hum (Sekretaris Kementerian PAN RB), Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum (Sekretaris Utama ANRI), Dra. Dini Saraswati, MAP (Deputi Bidang



Tim penilai seleksi terbuka calon pejabat eselon Ia

IPSK ANRI), Dr. Andi Kasman (Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI), Dr. Djoko Sutrisno, M.Si (Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN RI), dan Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum (Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia).

Ketujuh kandidat yang mengikuti seleksi terbuka tersebut adalah Drs. Azmi, M.Si, Drs. Imam Gunarto, M.Hum, Drs. Kandar, MAP, Drs. M. Taufik, M.Si, Rudi Anton, SH., MH, Drs. Sumrahadi, MIMS, dan Widarno, SH., MH. (Fir)

## ANRI BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA BANK INDONESIA

**JAKARTA, ARSIP** - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan Penghargaan bidang Kearsipan kepada Bank Indonesia atas kinerja yang sangat baik dalam hal pengalihmediaan dokumen pengaturan dan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari upaya Bank Indonesia mengelola arsip secara profesional, akuntabel dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku” ucap Gubernur BI, Agus Martowardojo dalam



Kepala ANRI berikan penghargaan bidang kearsipan kepada Gubernur BI Agus Martowardojo

sambutannya di acara serah terima penghargaan tersebut.

Penghargaan yang diterima oleh Bank Indonesia ini merupakan penghargaan pertama yang diberikan oleh ANRI kepada lembaga negara terkait dengan proses alih media.

“Pengalihan media dokumen pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK ini merupakan suatu prestasi dalam bidang kearsipan dan Upaya BI adalah prestasi luar biasa. Bank-bank lain diharapkan dapat meniru BI ” ujar Mustari Irawan dalam sambutannya. (RICK)



# CARI BUKTI PENETAPAN HARI JADI, PANSUS C DPRD KAB. MAJENE KUNJUNGI ANRI



Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK), Dra. Dini Saraswati, MAP menerima kunjungan Pansus C DPRD Kab. Majene

**JAKARTA, ARSIP** - Sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti dalam penetapan Hari Jadi Kab. Majene, tim Panitia Khusus (Pansus) grup C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Majene pada 17 Maret 2014 mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kunjungannya ini diterima oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK), Dra. Dini Saraswati, MAP dan didampingi Kasubdit Kearsipan Daerah II, Drs. Hilman Rosmana, Kasubdit Layanan Arsip, Mira Puspitarini, S.Sos. dan Kabag Humas, Dra. Listianingtyas M.

Dalam kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pansus Grup C, H.M. Yahya, tim penelusur

data penetapan hari jadi Kab. Majene mengemukakan beberapa hal berkaitan dengan data-data yang telah didapat untuk menetapkan hari jadi Kab. Majene. Asisten Daerah I Kab. Majene yang turut hadir pun berharap bahwa dalam khazanah arsip yang disimpan di ANRI dapat ditemukan bukti autentik yang dapat menjadi dasar penetapan hari jadi Kab. Majene.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Layanan Arsip ANRI menanggapi tentang penelusuran arsip hari jadi Kab. Majene. "Pada dasarnya, ANRI siap membantu untuk menelusur arsip yang memiliki keterkaitan dengan proses penetapan hari jadi Kab. Majene. Beberapa arsip yang sudah

kami dapatkan dapat dilihat di ruang baca ANRI. Namun, berdasarkan hasil pemaparan ibu sekretaris Tim tadi, kami akan menelusur dan meriset kembali arsip yang berkaitan dengan data-data tersebut," ungkap Mira.

Lebih lanjut Deputi IPSK memberikan apresiasi atas kesadaran tim pansus yang memiliki itikad untuk melibatkan arsip sebagai bukti autentik penetapan hari jadi. Dini pun dalam kesempatan ini menyampaikan pula bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan nasional khususnya berkaitan dengan pentingnya menyelenggarakan kearsipan di daerah dan peraturan daerah tentang kearsipan.(TK)

# CALON PIMPINAN TINGGI PRATAMA ANRI LAKSANAKAN CAT DI BKN



Suasana tes kemampuan bidang melalui Computer Assited Test (CAT) untuk seleksi calon pimpinan tinggi pratama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

**JAKARTA, ARSIP** - Sebanyak delapan belas orang peserta seleksi calon pimpinan tinggi pratama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 18 Maret 2014 mengikuti tahapan tes kemampuan bidang melalui *Computer Assited Test* (CAT) di gedung CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) lantai 2, jalan Letjen. Sutoyo nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur.

Rangkaian tes kemampuan bidang ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil BKN, Drs. Aris Windiyanto, M.Si. yang didampingi

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Zita Asih Suprastiwi, SH. Dalam sambutannya, Aris menyampaikan bahwa pelaksanaan tes CAT mencakup tes tentang wawasan kebangsaan, intelegensi umum dan tes kemampuan bidang kearsipan. Dalam kesempatan yang sama, Zita mengemukakan bahwa rekrutmen ini dilaksanakan secara terbuka dan peserta seleksi terdiri dari enam belas orang dari lingkungan internal ANRI dan dua orang eksternal ANRI (satu orang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta satu orang

dari Kementerian Perumahan Rakyat). Sebelum mengakhiri sambutannya, Zita pun memberikan ucapan selamat melaksanakan tes kepada kedelapan belas orang peserta. Adapun jumlah soal yang harus dikerjakan berjumlah seratus soal dan harus diselesaikan selama enam puluh menit. (TK)

## PENYERAHAN JRA BAWASLU DAN DKPP RI



Kiri-Kanan: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani berita acara serah terima arsip statis.

**JAKARTA, ARSIP** - Pesta demokrasi semakin dekat dan menjelang peristiwa penting tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah resmi memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) substantif dan fasilitatif. Artinya baik Bawaslu dan DKPP RI telah memiliki payung hukum dalam melakukan penyeleksian terhadap arsip-arsipnya. Bertempat di kantor Bawaslu, Jln. MH. Thamrin no 14, Jakarta Pusat, Mustari Irawan, Kepala Arsip Nasional RI, menyerahkan secara langsung JRA substantif dan fasilitatif kepada Sekertaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswanto.

Pada kesempatan yang sama,

dilakukan serah terima arsip statis baik dari Bawaslu dan DKPP RI. Arsip hasil putusan penyelesaian sengketa pemilu dan arsip statis Bawaslu dipindahtangankan ke ANRI untuk disimpan sebagai memori kolektif bangsa.

Dalam sambutannya, Mustari Irawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu dan DKPP RI atas perhatian lebihnya pada penyelenggaraan kearsipan di masing-masing lembaga tersebut. Beliau menekankan makna dalam penyerahan arsip Bawaslu dan DKPP tersebut, Pelaksanaan terhadap pasal 48 dan pasal 53 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta sebuah pembelajaran politik bagi generasi

selanjutnya yang dapat dilihat melalui arsip. “Melalui arsip Bawaslu dan DKPP RI dapat diperoleh gambaran bagaimana demokrasi di Indonesia” ujar Mustari.

Senada dengan Kepala ANRI yang menjelaskan peran arsip dalam pembelajaran politik, Ketua Bawaslu melihat arsip sebagai harga diri lembaganya. “Sebagaimana dokumen dapat dipertanggungjawabkan itulah harga diri dari Bawaslu” tutur Muhammad, Ketua Bawaslu yang kemudian diamini oleh himbuan Ketua DKPP RI yang mengajak seluruh jajarannya untuk semakin tertib administrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. (ANN)



# FORMULIR PENGAJUAN ARSIP KAA SEBAGAI MOW DIBAHAS FINAL



Suasana *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Nominasi Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai *Memory of The World* (MoW)

**JAKARTA, ARSIP** - Sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Nominasi Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai *Memory of The World* (MoW) kembali digelar sebelum formulir pengajuan tersebut diajukan kepada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). FGD yang diselenggarakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jalan Gatot Subroto Jakarta pada 21 Maret 2014 ini turut dihadiri pula oleh Kepala ANRI Mustari Irawan, MPA., Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd., Ketua Komite MoW Indonesia Prof. Dr. Bambang Subiyanto.

Sebelum FGD dimulai, Mustari menyampaikan harapannya bahwa dengan diajukannya arsip KAA sebagai MoW ini diharapkan menjadi salah satu media diseminasi arsip tentang diplomasi internasional. "Sejak tahun 2010, ketika KNIU mulai merancang pengajuan arsip KAA sebagai MoW, ANRI sudah melakukan beberapa persiapan di antaranya pelaksanaan rapat koordinasi, seminar, *workshop*, dan FGD yang turut menghadirkan beberapa pakar dan pihak yang terkait, "terangnya. Senada halnya dengan Arief dan Bambang yang berharap bahwa momen pengajuan arsip KAA sebagai MoW ini dapat kembali membangkitkan semangat

bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika.

FGD yang dipimpin oleh Direktur Preservasi ANRI, Drs. Imam Gunarto, M. Hum. menghasilkan beberapa masukan guna membahas final formulir pengajuan yang akan dikirimkan ke UNESCO pada 26 Maret 2014 ini. Sebelumnya, peserta FGD diajak untuk menyaksikan film tentang KAA yang secara khusus disiapkan ANRI sebagai lampiran pengajuan formulir arsip KAA sebagai MoW. (TK)

# KEPALA ANRI BUKA SEMINAR PENGAMANAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA YANG TERSANGKUT PERKARA PIDANA (EXTRAORDINARY CRIME)

**JAKARTA, ARSIP** - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) pada 26 Maret 2014 menggelar Seminar Nasional Kearsipan yang mengupas tema “Pengamanan Dokumen/Arsip Negara yang Tersangkut Perkara Pidana (*Extraordinary Crime*)” di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C, lantai 2, ANRI jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan. Seminar yang dibuka secara resmi oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan, MPA. pada pukul 09.00 ini terdiri dari tiga sesi dengan peserta dari berbagai unsur, di antaranya, aparaturnegara, organisasi profesi kearsipan, perbankan, praktisi hukum dan akademisi.

Dalam sambutan pembukaannya, Mustari menyampaikan bahwa kegiatan seminar yang diselenggarakan AAI ini sejalan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang membahas tentang organisasi profesi. “Melalui seminar ini kita bersama-sama membangun suatu konsepsi di antaranya tentang mekanisme dalam menangani penciptaan arsip yang bersifat strategis, agar digunakan oleh stakeholder sebagai bahan akuntabilitas dengan tetap menjaga keautentikannya,” tambah Mustari.

Pada sesi kesatu seminar ini menghadirkan pembicara Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ranu Miharja, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI Zita Asih Suprastiwi, Kepala Satgas Pengelolaan Barang Bukti KPK Andi Suharliis. Dalam sesi ini dibahas tentang Pengamanan Dokumen Negara dalam Proses Penanganan



Seminar Nasional Kearsipan “Penanganan Dokumen/Arsip Negara yang Tersangkut Perkara Pidana *Extraordinary Crime*”

Tindak Pidana Korupsi. Pada kesempatan ini pembicara dari KPK dan ANRI mengupas hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan terhadap kasus korupsi yang kerap kali melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti termasuk dokumen. Selama ini dalam melakukan penyitaan dokumen, KPK tetap bekerja sesuai dengan prosedur di antaranya dilaksanakannya penandatanganan berita acara penyitaan dokumen. Tetapi, ke depannya KPK akan melakukan kerja sama dengan ANRI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan arsip/dokumen. Pada sesi ini Ranu pun mengemukakan bahwa para pesertav di sini yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dokumen ini jangan merasa takut dengan kewajiban menyimpan dokumen.

Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Anhar Gonggong, dan Pakar

Kearsipan Internasional Djoko Utomo, MA.. menjadi pembicara sesi kedua. Dalam kesempatan ini dibahas tentang Menjaga Dokumen/Arsip Negara untuk Memperkuat Kedaulatan Negara. Dalam pembahasan pun memetakan pula tentang jenis dokumen yang memiliki nilai strategis dan vital yang berperan untuk memperkuat kedaulatan negara. Sedangkan pada sesi ketiga dilaksanakan pembahasan materi seputar Transaksi Elektronik dan Pengamanannya dengan pembicara dari PPATK dan Mabes Polri. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr. Muhammad Yusuf, SH., MH dan Fian Aruma Rafael dari Bareskrim Mabes Polri bertindak sebagai pembicara yang membahas pula seputar dokumen elektronik (digital) yang sering digunakan alat bukti yang keautentikannya memerlukan keahlian tersendiri untuk membuhtikannya. (TK)



# MOU ANRI DENGAN BMKG, UPAYA PENYELAMATAN ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

**JAKARTA, ARSIP** - Tari Saman dari Nangroe Aceh Darusalam menambah semarak Rakornas BMKG 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada tanggal 2 April 2014. Rakornas yang mengambil tema “Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Otomatisasi Peralatan Sebagai Pondasi Peningkatan Layanan MKKuG”. Acara yang dihadiri oleh Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng, Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA bersama pejabat eselon 1 dan 2 dilingkungan ANRI, staf ahli dari Kementerian PU dan tamu undangan VIP dari berbagai kalangan serta tidak ketinggalan para peserta Rakornas BMKG di Balai 1 sampai 5 di seluruh Indonesia dan anggota Persatuan Dharma Wanita BMKG. Adapun kegiatan Rakornas tersebut berlangsung Penandatanganan MoU antara BMKG dengan ANRI tentang Penyelenggaraan Kearsipan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Dalam sambutannya Kepala ANRI menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan suatu langkah besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan sehingga diharapkan dengan terlaksananya kerjasama ini dapat membantu dalam penyelenggaraan tugas pokok kita selaku instansi publik dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada publik. Hal ini juga perlu dilakukan dalam upaya penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika serta dalam upaya penyelamatan arsip sebagai bahan



Penandatanganan MoU antara BMKG dengan ANRI tentang Penyelenggaraan Kearsipan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.

pertanggungjawaban nasional. Hal-hal tersebut di atas, baik secara langsung ataupun tidak langsung harus dapat kita pertanggungjawabkan baik secara riil dan materil kepada negara dan rakyat. Beliau mengingatkan bahwa di dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Pasal 3 mengamanatkan kepada kita selaku pelayan publik memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa dan negara terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di amanatkan oleh Undang-Undang kepada kita selaku instansi publik.

Kepala BMKG mengatakan bahwa, sebelumnya pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh, BMKG mendeteksi

gempa dan sebagainya dibutuhkan waktu 1 jam. Dalam waktu 5 tahun setelah tragedi tsunami Aceh BMKG dapat mendeteksi hanya dalam waktu 5 menit dan dalam 5 tahun mendatang sampai 2019, BMKG menargetkan layanan peringatan dini tsunami dari sebelumnya 5 menit menjadi 3 menit. Ada beberapa hal mengapa bencana berdampak sangat besar yaitu karena masyarakat tidak tahu kapan bencana terjadi, daya dukung alam yang rentan dan tidak ada sistem peringatan dini. Pada bagian sistem peringatan dini menjadi tugas BMKG untuk mempersiapkannya karena sangat berperan penting dalam evakuasi bencana. “Semakin cepat informasi disebarluaskan, semakin besar kemungkinan evakuasi berhasil dilakukan”, tambah beliau. (FIR)

## HUT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KE-15, ANRI BERIKAN “KADO SPESIAL”

**LAMPUNG, ARSIP** - Senin 21 April 2014, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyerahkan “kado spesial” kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa Citra Kabupaten Lampung Timur dalam Arsip. Penyerahan Citra Daerah tersebut dilaksanakan di *Islamic Centre* Sukadana dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-15 Kabupaten Lampung Timur. Citra Daerah diserahkan oleh Kepala ANRI yang diwakili oleh Direktur Pengolahan Drs. Azmi, M.Si kepada Bupati Lampung Timur Erwin Arifin SH, MH.

Acara HUT Ke-15 Kabupaten Lampung Timur berlangsung meriah dan dihadiri oleh Perwakilan dari Provinsi Lampung, Bupati Mesuji, Kepala Satuan Kerja Perangkat



Penyerahan Citra Kabupaten Lampung Timur oleh Kepala ANRI yang diwakili oleh Direktur Pengolahan Drs. Azmi M.Si kepada Bupati Lampung Timur Erwin Arifin SH, MH

Daerah dan Camat se-Kabupaten Lampung Timur serta disaksikan oleh masyarakat sekitar Sukadana.

Lampung Timur merupakan

salah satu kabupaten baru di Provinsi Lampung. Wilayahnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1999. Kabupaten Lampung Timur terkenal dengan gajahnya yang dapat “bermain” bola. Di daerah ini juga terdapat Taman Nasional Way Kambas.

Wilayah berpenghasil lada itu, dikenal sebagai daerah tujuan transmigrasi sejak zaman kolonial Belanda. Oleh karenanya, banyak nama daerah di wilayah Lampung Timur menggunakan nama asal transmigran, seperti Pekalongan, Purbolinggo, dan lain-lain. (Agg)

## PUSJIBANG KEARSIPAN ANRI SIAPKAN PEDOMAN RETENSI ARSIP SUBSTANTIF NASIONAL

**JAKARTA, ARSIP** - Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional RI tengah menggarap Pedoman Retensi Arsip Substantif Nasional. Dimulai dengan mengundang Kementerian terkait. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI menggelar Rapat Koordinasi Awal dengan tajuk “Penyusunan Draft Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pedoman Retensi Arsip”. Bertempat di RSG Soemartini Arsip Nasional RI, acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Dini Saraswati.

Dalam sambutannya Dini menyampaikan apresiasi pertemuan

awal ini dan berharap titik awal ini dapat menghasilkan sebuah Pedoman Retensi Arsip Substantif yang dapat dipakai secara nasional yang akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi negara.

Kegiatan yang dihadiri oleh 50 orang peserta dari Kementerian/ Lembaga terkait ini kemudian langsung dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Rudi Anton, sebagai narasumber. Mengawali paparannya Rudi Anton menyampaikan mengenai pentingnya arsip terutama sebagai barang bukti dan konsekuensi dari lahirnya UU

KIP. Rudi juga menyampaikan bahwa Pedoman Retensi Arsip Substantif yang dalam 2 tahun kedepan menjadi program kerja merupakan sebuah “hutang” yang belum terbayar selama 35 tahun, tepatnya terhitung sejak UU No 7 Tahun 1979 disahkan.

Masih dalam paparannya Rudi juga menginformasikan bahwa telah ada koordinasi yang baik antara ANRI, Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri mengenai tata naskah dinas. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik tidak terdapat kerancuan lagi dan dengan adanya Pedoman Retensi Arsip Substantif ini akan ada pengelolaan arsip yang sistemik. (ANN)

# TATA KELOLA ARSIP, BNI PEROLEH AKREDITASI “ISTIMEWA”

**JAKARTA, ARSIP** - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperoleh akreditasi “A” (Istimewa) dalam penyelenggaraan kearsipan. Akreditasi tertinggi itu dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui proses tahapan penilaian yang ketat. Dengan pengelolaan arsip yang baik, data-data yang dimiliki BNI dapat tersimpan dengan Aman

Sertifikat akreditasi disampaikan langsung oleh Kepala ANRI Mustari Irawan kepada Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo di gedung BNI, Sudirman, Jakarta. “Penghargaan ini adalah penghargaan yang tertinggi yang kami berikan kepada sebuah perbankan nasional” ungkap Mustari, 5 Mei 2014.

Gatot mengungkapkan bahwa arsip itu sesuatu yang *simple*, tapi sangat krusial. Keberadaan arsip sangat dibutuhkan kalau ada ricuh orang atau ada hal-hal lain diluar dugaan. Dengan tata kelola arsip yang baik akan memudahkan urusan perusahaan. “*simple thing but very-very important*”, ujarnya.

Gatot mendorong kepada divisi pengelolaan arsip di BNI untuk terus meningkatkan kinerjanya di bidang kearsipan. “Akreditasi ini bukanlah *the end of the story, only the begining of the story*. Dimana kita dari tahun ke tahun harus terus melakukan perbaikan-perbaikan, mengikuti dengan perubahan-perubahan yang terjadi di industri perbankan”, tambahnya.

Kepala ANRI juga mengucapkan selamat kepada BNI yang telah memperoleh akreditasi A dalam pengelolaan arsip dan dapat diikuti oleh industri perbankan lain. “Mudah-



Penyerahan Sertifikat Akreditasi di Bidang Kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.



Suasana Penyerahan Sertifikat Akreditasi

mudahan saya berharap bahwa seluruh perbankan, baik yang pemerintah maupun swasta, bisa mengikuti BNI untuk sama-sama memberikan perhatian terhadap masalah kearsipan”, lanjutnya.

Adapun sejumlah langkah yang telah dilakukan BNI dalam pengelolaan arsip yang maksimal, yaitu, pertama, membuat *record centre* yang modern

di Cikupa, Tangerang dengan luas lahan 3 hektar dan luas bangunan 1,2 hektar. Record Centre ini dapat menampung 315.000 kotak arsip, untuk melayani BNI se-Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten.

Kedua, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia kearsipan baik melalui sosialisasi maupun dengan mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop, uji kompetensi, dan sertifikasi. Sebanyak 36 pegawai telah memiliki sertifikasi bidang kearsipan. Ketiga, membuat pedoman perusahaan untuk kearsipan agar sesuai dengan undang-undang dan kaidah-kaidah kearsipan.(sa)



## KUNJUNGAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT LAKSAMANA TNI DR. MARSETIO KE ANRI



Foto bersama Kepala Staf Angkatan Laut dan Sekretaris Utama ANRI beserta jajarannya

**JAKARTA, ARSIP** - Dalam rangka menghimpun informasi sejarah mengenai Angkatan Laut, pada senin 5 mei 2014 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio untuk melaksanakan wawancara sejarah lisan. Kehadiran Kasal yang didampingi para Pejabat Teras Mabas TNI AL diterima secara resmi oleh Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni didampingi Direktur Akuisisi, dan Kepala Biro Perencanaan. Laksamana TNI Dr. Marsetio menyambut baik kegiatan wawancara sejarah lisan dan berharap



Kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut ke Layanan Arsip ANRI

dapat dilanjutkan dengan wawancara berikutnya. Dalam kesempatan tersebut Kasal berkenan memberikan beberapa VCD dan buku buku yang berkaitan dengan tugas Angkatan

Laut dalam menjaga wilayah laut nusantara. Acara kunjungan diakhiri dengan tinjauan ke Ruang Layanan Peminjaman Arsip dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. (Ning)

# ANRI BERI APRESIASI WORKSHOP AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK DAN ARSIP HASIL DIGITALISASI



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Membuka Acara Workshop Kearsipan Asean Autentikasi Arsip elektronik dan Arsip Hasil Digitalisasi

**JAKARTA, ARSIP** - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) pada 20 Mei 2014 menggelar Workshop Kearsipan ASEAN Autentikasi Arsip Elektronik dan Arsip Hasil Digitalisasi di Ruang Mawar, Balai Kartini. Seminar yang menghadirkan pembicara dari akademisi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dan pakar kearsipan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Dr. Andi Kasman, SE., MM.

Dalam sambutannya, Andi menyampaikan bahwa workshop ini merupakan salah satu wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. "Melalui forum ini kita

bisa bersama-sama memberikan kontribusi berupa masukan yang di antaranya berkaitan dengan penggunaan arsip elektronik dan hasil digitalisasi menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan hak-hak keperdataan masyarakat. ANRI pun memberikan apresiasi yang tinggi pada acara ini," jelas Andi.

Workshop yang diprakarsai AAI ini menjadi suatu hal yang penting mengingat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan dokumen/arsip elektronik banyak digunakan. Banyak pihak pula yang sudah dan mulai mengalihmediakan/digitalisasi dokumen/arsip dari media kertas ke media digital. Hasil digitalisasi dokumen/arsip tersebut termasuk pada kategori arsip elektronik. Arsip hasil digitalisasi dan arsip elektronik ini kadang kala memunculkan

keraguan berkaitan dengan keabsahan/keautentikannya.

Adapun penyampaian materi workshop dibagi menjadi dua bagian, pada sesi pertama dibahas tentang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip di Era Digital serta Autentikasi Informasi dan Fisik Arsip. Pada sesi kedua dibahas materi Alih Media dan Autentikasi Arsip serta Aspek Legal Arsip Elektronik: Studi Kasus Autentikasi Arsip. Workshop berlangsung sampai dengan pukul 15.00 WIB diikuti 120 peserta dari berbagai unsur, di antaranya dari lembaga negara, perusahaan, perguruan tinggi, organisasi politik dan organisasi masyarakat. (TK)

## SELARASKAN ARAH DAN PRIORITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PEMERINTAHAN DAERAH, ANRI GELAR RAKORNAS BIDANG KEARSIPAN



Kepala ANRI memberikan sambutan dan membuka acara Rakornas Bidang Kearsipan di Swissbell Hotel Mangga Besar, Jakarta.

**JAKARTA, ARSIP** - Direktorat Kearsipan Daerah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kearsipan yang dibuka pada 20 Mei 2014 pukul 19.00 WIB di Swissbell Hotel Mangga Besar, Jalan Kartini Raya Nomor 57, Mangga Besar, Jakarta Utara. Rakornas ini dilaksanakan guna menyelaraskan pemahaman mengenai arah, ruang gerak, dan prioritas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah pada RPJM 2015-2019 dan diikuti perwakilan lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia sejumlah 400 orang.

Acara rakornas yang dibuka oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan, MPA. ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Kearsipan ke-43 yang jatuh tepat pada 18 Mei 2104. Dalam sambutan pembukaannya, Mustari mengungkapkan bahwa rakornas ini menjadi salah satu wujud kontribusi kearsipan bagi pemerintahan

daerah dan masyarakat. “Ada hal yang harus diperhatikan dalam rangka pemerintahan daerah yang otonom, bagaimana pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sudahkah capaian pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya. Selain pembukaan acara rakornas dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ANRI dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang. Rakornas dilaksanakan terhitung tanggal 20 Mei s.d 21 Mei 2014.

Dalam kesempatan ini pun, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Dr. Andi Kasman, SE.,MM berkesempatan memaparkan materi tentang Rencana Aksi Pembinaan Kearsipan Daerah yang di antaranya membahas penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan dan lembaga kearsipan pada K/L di tingkat Pusat dan Daerah terutama di

daerah wilayah perbatasan negara, penguatan fungsi dan peranan unit dan lembaga kearsipan pada K/L di tingkat Pusat dan Daerah melalui pembangunan records center dan depot arsip statis, pengembangan sumber daya manusia kearsipan terutama arsiparis baik secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan Direktur Kearsipan Daerah, Widarno, SH, MH, dalam pemaparan materinya menekankan bahwa mengakhiri RPJM 2010-2014, setiap pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah harus bisa mengevaluasi capaian kerjanya.

Adapun hasil yang diharapkan melalui rakornas ini di antaranya adalah dihasilkannya rekomendasi arah, ruang gerak, dan prioritas penyelenggaraan kearsipan bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk RPJM 2015-2019 yang dapat menjadi dasar dan acuan lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun RPJMD 2015-2019. (TK)



# RIDWAN KAMIL: DIORAMA DI ANRI INSPIRATIF!



Kunjungan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ke Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, ANRI.

**JAKARTA, ARSIP** - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan, MPA beserta jajaran pada 21 Mei 2014 menerima kunjungan kerja Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil yang sekaligus pula melaksanakan wawancara sejarah lisan dengan tim wawancara sejarah lisan ANRI. Dalam kunjungan pertama kalinya ke ANRI, pria yang akrab disapa Kang Emil ini berkesempatan mengunjungi Ruang Baca ANRI dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa.

Ketika berada di Ruang Baca ANRI, Kang Emil terlihat begitu antusias saat mengamati berbagai khazanah arsip ANRI yang berkaitan dengan Kota Bandung. Beberapa khazanah arsip tersebut antara lain blue print Gedung Sate, pidato Presiden Soekarno saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Kota Bandung, peta



Tim Sejarah Lisan ANRI sedang mewawancarai Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

kota Bandung pada abad ke-17, foto Bandung tempo dulu dan lain-lain.

Usai mengunjungi Ruang Baca, Kang Emil kemudian berkesempatan menelusuri delapan hall di Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. Decak kagum Kang Emil nampak jelas ketika

beliau mengamati berbagai muatan materi yang berada di diorama sampai akhirnya berada di hall terakhir. "Diorama terbaik yang pernah saya kunjungi, inspiratif, "tutup Kang Emil saat menyampaikan pesan dan kesannya mengunjungi diorama. (TK)

# 21 INSTANSI TUNAIKAN PASAL 53 AYAT (1) UU NOMOR 43 TAHUN 2009

**JAKARTA, ARSIP** - Euforia Peringatan Hari Kearsipan ke-43 tahun ini dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), salah satu yang menjadi kebanggaan, 21 lembaga baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat dengan penuh kesadaran menyerahkan arsip statisnya.

Prosesi yang dikemas dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Akuisi Instansi Strategis tersebut berlangsung pada 20 Mei 2014 pukul 09.00 WIB di Amaroosa Hotel yang berlokasi di jalan Pangeran Antasari No 9a-b Jakarta. Dalam momentum tersebut secara berurutan Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perumahan Rakyat RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Badan Pelaksana BPLS, Arsip Nasional RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Konstitusi RI, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), PT. Pelindo III, PT. Askes (BPJS), PT. Angkasa Pura I dan Sdri. Rina Rakhmawati, memindah tangankan arsip statisnya kepada Arsip Nasional RI.



Kepala ANRI Mustari Irawan membuka acara Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Instansi Strategis dan Serah Terima Arsip Lembaga Negara dan Perusahaan



Suasana diskusi panel rakor akuisisi

Dalam sambutannya, Kepala Arsip Nasional RI, Mustari Irawan mengakui pada acara inilah jumlah instansi terbanyak yang secara simultan menyerahkan arsipnya ke ANRI. "Hari ini banyak kementerian dan lembaga yang menyerahkan arsip ke ANRI, yang terbanyak, barangkali bisa masuk rekor MURI" ujar Mustari. Selanjutnya ditekankan pula bahwa yang terpenting dalam penyerahan arsip bukanlah

kuantitasnya melainkan kesadaran dari Kementerian/ Lembaga bahkan Masyarakat untuk melestarikan arsip sebagaimana yang dilakukan oleh Rina Rakhmawati, mahasiswi S2 Universitas Gajah Mada yang dengan sukarela menyerahkan arsip akta tanah ke ANRI.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili instansi penyerah arsip, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan DKPP RI, Gunawan Suswanto, menghimbau instansi-instansi yang baru berdiri untuk menyelamatkan arsipnya. Hal senada juga disampaikan oleh Hayati dari PT. Pelindo III yang menghimbau BUMN lainnya untuk menyerahkan arsip statis untuk menjaga memori instansi. (aNN)

# PENGELOLAAN ARSIP BAIK, OPINI WTP DI “TANGAN”



Sekretaris Utama ANRI memberikan arahan kepada para peserta sosialisasi peraturan kearsipan

**PANGKAL PINANG, ARSIP** - Hotel Santika, Pangkal pinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi tempat bagi 100 peserta dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perguruan Tinggi se-Provinsi Kepulauan Babel yang menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada 4 Juni 2014. Kegiatan yang dibuka Staf Ahli Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup provinsi Babel, Drs. Hasanudin, MM turut dihadiri pula oleh Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Babel beserta jajaran pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI.

Hasanudin yang hadir mewakili Gubernur Kepulauan Babel dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap tujuan, pengertian, asas dan tata cara penyelenggaraan kearsipan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dan berwibawa sehingga arsip yang tercipta dapat menjadi barang bukti, sarana informasi, pengambilan kebijakan serta bahan pembelajaran.

Sedangkan dalam arahannya, Gina mengingatkan agar seluruh pengelola dan pencipta arsip dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga arsip yang diciptakan dapat terpercaya dan dapat digunakan untuk pertanggungjawaban nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan yang

berlaku. “Dengan pengelolaan arsip yang baik maka akan mendukung dan memudahkan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Gina.

Gina pun mengingatkan bahwa di akhir masa pemerintahan kabinet pembangunan II serta masa peralihan ke pemerintahan yang baru harus lebih tercerminkan sistem pengelolaan kearsipan yang baik agar sejarah peralihan transisi pemerintahan dapat tercipta dengan baik dan tidak tercecer. “Oleh karena itu sudah tidak ada lagi arsip yang di musnakan tanpa prosedur dan pengelolaan arsip tanpa sistem/pedoman tata keola kearsipan yang berlaku, sehingga sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak tercecer, “tegasnya. (Fir)



# EMPAT BUMN SUSUN INSTRUMEN SIKD



Deputi Bid. Pembinaan Kearsipan Dr. H. Andi Kasman, SE., MM. saat memberikan arahan dalam acara penyusunan dan pembahasan instrumen SIKD bagi empat BUMN

**JAKARTA, ARSIP** - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) telah lama dibangun Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai sarana pengelolaan arsip dinamis. ANRI dalam hal ini Direktorat Kearsipan Pusat melaksanakan penyusunan dan pembahasan instrumen pendukung demi terlaksananya penerapan SIKD tersebut. Kali ini pembahasan dilaksanakan dengan empat Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), PT. Pos Indonesia (Persero), Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Semarang, dan PTPN XIV Makassar. Acara dilaksanakan selama tiga hari mulai 5 s.d. 7 Juni 2014 di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.



Direktur Kearsipan Pusat, Drs. M Taufik, M.Si memberikan sambutan dalam acara penyusunan dan pembahasan instrumen SIKD bagi empat BUMN

Pembukaan acara ini dimulai dengan sambutan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Dr. H. Andi Kasman, SE., MM. dan dilanjutkan pemaparan materi terkait dengan kebijakan kearsipan nasional serta kebijakan yang berkaitan dengan SIKD. Pembahasan dan penyusunan intrumen SIKD dilakukan oleh masing-

masing tim dari empat BUMN dengan tim dari ANRI. Adapun empat instrumen yang harus ada untuk penerapan SIKD adalah tata naskah dinas/perusahaan, pola klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta klasifikasi keamanan dan akses arsip. Empat instrumen tersebut dibahas dan disusun guna terlaksananya implementasi SIKD di tiap BUMN yang mengikuti acara ini.

Acara ditutup oleh Direktur Kearsipan Pusat, Drs. M Taufik, M.Si. yang dalam sambutan penutupannya di antaranya menyatakan dalam rangka pembinaan kearsipan, ANRI akan membimbing secara teknis dan mengawal implementasi SIKD guna pengelolaan arsip yang berujung pada pelestarian arsip statis. (Spy)

## ANRI TURUT BERPARTISIPASI PADA PPKI 2014

**BATAM, ARSIP** - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) turut berpartisipasi dalam Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) tahun 2014 yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono. PPKI ini diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Nasional ke-25 di Batam, kepulauan Riau. Adapun partisipasi yang diberikan ANRI dalam PPKI tahun 2014 yang mengusung tema Kreativitas dalam Harmoni ini berupa keikutsertaan pameran kelembagaan ANRI dengan materi antara lain pelayanan publik di lingkungan



Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. H.M. Surya Respartiono mengunjungi stan pameran kelembagaan ANRI

ANRI, virtual tour Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, *display* beberapa arsip yang berada di Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, pemutaran film dokumenter dan restorasi arsip

dengan menggunakan cara *sizing* dan enkapsulasi.

Pada kesempatan ini banyak pengunjung yang begitu antusias dengan materi yang ditampilkan, terutama dalam bentuk virtual tour, film dokumenter dan restorasi arsip. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mencoba enkapsulasi dan meminta pelayanan enkapsulasi gratis seperti enkapsulasi Kartu Tanda Penduduk. Selain itu, kuis tebak gambar dengan menggunakan aplikasi QR code yang tersaji di stand pameran kelembagaan ANRI menambah antusias publik untuk mengunjungi stand pameran kelembagaan ANRI. (TK)

## ANRI TEKEN KERJA SAMA DENGAN ARSIP NASIONAL AUSTRALIA

**JAKARTA, ARSIP** - Disaksikan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty pada 17 Juni 2014 Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan, MPA dan Kepala Arsip Nasional Australia David Fricker menandatangani Nota Kesepahaman dan Program Eksekutif periode Juni 2014 – Desember 2015. Acara penandatanganan dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan lantai 4 gedung C, ANRI.

Usai acara penandatanganan Greg menyampaikan sambutan singkatnya yang mengungkapkan bahwa kerja sama yang dibangun antara Indonesia dengan Australia dalam bidang kearsipan ini akan memberikan manfaat pada masa mendatang. Senada juga halnya dengan yang disampaikan Fricker dan Mustari bahwa kerja sama ini akan



Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Program Eksekutif oleh Kepala Arsip Nasional Australia David Fricker dan Kepala ANRI Mustari Irawan disaksikan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty

memberikan manfaat besar dalam bidang kearsipan.

Adapun ruang lingkup MoU antara ANRI dengan Arsip Nasional Australia di antaranya pertukaran kemampuan dan pengalaman di bidang preservasi

digital dan penggunaan teknologi online, dukungan non material untuk proses aplikasi ke universitas di Australia untuk pengembangan profesional di bidang kearsipan. (TK)

## ANRI “BERGANDENGAN TANGAN” DENGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

**JAKARTA, ARSIP** - Pada 19 Juni 2014 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) resmi “bergandengan tangan” dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Kepala ANRI Mustari Irawan, MPA dan Kepala Perpusnas Dra. Sri Sularsih, M.Si. Kesepakatan bersama antara ANRI dengan Perpusnas yang ditandatangani di Ruang Sidang Perpusnas, jalan Salemba Raya nomor 28A ini mencakup koordinasi pembinaan, penyelamatan dan pelestarian di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam sambutan yang disampaikan usai acara penandatanganan Mustari menyampaikan bahwa bidang kearsipan dan perpustakaan ini seperti halnya saudara kandung, dua-duanya berkaitan dengan informasi. “Bahkan, jika kita lihat di daerah, secara institusi hanya ada tiga yang berdiri sendiri-sendiri antara kearsipan dan perpustakaan. Jadi kesamaan dan



Kepala ANRI Mustari Irawan dan Kepala Perpusnas Sri Sularsih berjabat tangan usai menandatangani kesepakatan bersama

kesejajaran program di daerah dapat dikoordinasikan, apalagi diperkuat dengan adanya kesepakatan bersama ini,” jelas Mustari. Demikian pula halnya disampaikan Sri Sularsih bahwa dengan adanya kesepakatan

bersama ini, antar lembaga dapat saling berbagi dan saling melengkapi. “Kita juga dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki tiap lembaga agar publik dan masyarakat bisa ikut merasakannya,” ungkap Sri. (TK)

## ANRI SERAHKAN APLIKASI SIKD KE KEMENTERIAN PP DAN PA

**JAKARTA, ARSIP** - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK) Dra. Dini Saraswati, MAP menyerahkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M. Sc. Penyerahan aplikasi SIKD ini dilaksanakan pada 26 Juni 2014 di kantor Kementerian PP dan PA, jalan Medan Merdeka Barat nomor 15, Jakarta. Dalam kesempatan ini, turut hadir pula Kepala Biro Umum Kementerian PP dan PA dan Kasubdit Kearsipan Pusat I ANRI Drs. Tato Pujiarto.

Dalam sambutannya, Sulikanti menyampaikan bahwa kesempatan



Deputi Bid. IPSK ANRI Dini Saraswati (kiri) menyerahkan aplikasi SIKD kepada Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PP dan PA Sulikanti Agusni (kanan)

ini harus dimanfaatkan oleh rekan-rekan Kementerian PP dan PA untuk belajar pengelolaan arsip yang lebih baik lagi. “Apalagi sebelumnya sudah ada bimbingan teknisnya terlebih dahulu tentang kearsipan dinamis,

mudah-mudahan rekan-rekan dapat menerapkannya dalam rutinitas perkantoran sehari-sehari. Dengan demikian, jika ke depannya kita membutuhkan data-data masa lalu kita juga tidak akan kesulitan mencarinya kalau mengelola arsipnya baik,” tegas Sulikanti. Senada dengan hal tersebut, Dini pun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan ANRI dalam pembinaan kearsipan di lingkungan kementerian/ lembaga. Beliau berharap agar aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan nantinya dapat memberikan dukungan dalam akses arsip dinamis bagi masyarakat jika telah dihubungkan dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). (TK)



# ANRI PERTAHANKAN PREDIKAT OPINI WTP TAHUN 2013 DARI BPK RI

**JAKARTA, ARSIP** - 20 Juni 2014 Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan 37 kementerian/ lembaga tahun 2013 atas kinerja keuangan entitas negara di Auditorium Tower BPK RI Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.

Dalam acara tersebut, turut hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta para Kepala LPNK beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Mustari Irawan di dampingi oleh Plh. Sekretaris Utama Syaifuddin dan Kepala Bagian Keuangan yg mewakili Inspektorat Kahim Sunjaya.

Dalam sambutannya anggota III BPK Agus Joko Pramono, menyebutkan terdapat lima kementerian/ lembaga mencapai peningkatan opini dan lima kementerian/ lembaga yang mengalami penurunan capaian opini dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 2013 BPK kepada 37 kementerian/ lembaga. Sementara itu hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013, ANRI untuk keenam kalinya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Agus, pelaksanaan pemeriksaan keuangan BPK dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu: pertama, kesesuaian laporan keuangan dgn standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP. Ketiga, efektifitas sistem pengendalian intern. Keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Agus menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan atas 37 Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK) 2013 BPK memberikan opini



Wakil Ketua BPK memberikan selamat kepada Kepala ANRI atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 26 kementerian/ lembaga. Dengan banyak entitas yang memperoleh opini WTP menunjukkan sebagian besar kementerian/ lembaga bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan harus terus dijaga.

Beliau juga mengingatkan bahwa opini WTP yang diberikan tidak menjamin kementerian/ lembaga bebas dari penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara ataupun praktek KKN dan tidak ada jaminan juga bahwa tahun yang akan datang akan mendapat opini WTP kembali. Itu bisa terjadi jika dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI terungkap temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Permasalahan yang terkait dengan kelemahan SPI utamanya adalah ketidaktertiban terutama dalam pengelolaan aset tetap dan bantuan sosial.

Sebagai contoh masalah yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Antara lain BPK masih menemukan hibah yang belum diajukan pengesahan ke Kementerian Keuangan, kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang dan belanja modal, dan penyimpangan perjalanan dinas. Di samping itu, BPK juga menemukan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan barang/ jasa, antara lain kelebihan pembayaran, pemahalan harga, belanja fiktif, denda belum dipungut dari rekanan dan pertanggungjawaban tidak akuntabel (tidak ada/ lengkap/ sesuai ketentuan).

Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri mengatakan mengelola keuangan negara bukan hal mudah namun ada aturan dan rasa keadilan serta kepatutan yang harus dipenuhi. Laporan BPK RI tersebut menekankan penggunaan anggaran dari masing-masing kementerian/ lembaga. Selain itu laporan tersebut juga melihat bagaimana kementerian/ lembaga mengelola aset, mencatat pendapatan dan pengeluarannya. (FIR)

## JASA RAHARJA TERIMA APLIKASI SIKD DARI ANRI



Deputi Bid. Pembinaan Kearsipan ANRI Dr. Andi Kasman (kiri) menyerahkan aplikasi SIKD kepada Dir. Manajemen Risiko dan TI PT. Jasa Raharja (Persero) M. Wahyu Wibowo

**JAKARTA, ARSIP** - PT. Jasa Raharja (Persero) yang dalam hal ini diwakili Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi M. Wahyu Wibowo menerima aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang diserahkan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. H. Andi Kasman pada 27 Juni 2014. Serah terima aplikasi SIKD ini dilaksanakan di kantor pusat PT. Jasa Raharja (Persero), jalan HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelum pelaksanaan serah

terima aplikasi SIKD di PT. Jasa Raharja (Persero) ini, ANRI telah melakukan survey dan pembahasan instrumen SIKD bersama pihak PT. Jasa Raharja sebagai salah satu bagian pembinaan kearsipan di instansi tingkat pusat.

Dalam sambutannya, M. Wahyu mengungkapkan bahwa arsip ini merupakan aset informasi yang autentik sehingga pengelolaannya pun harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. "Semoga dengan telah diterimanya aplikasi SIKD ini dapat menjadi salah satu pendukung dalam penyempurnaan

penerapan kearsipan secara elektronik di lingkungan Jasa Raharja," jelas Wahyu. Lebih lanjut Andi pun menjelaskan bahwa pengelolaan arsip dinamis ini amat erat kaitannya dengan era keterbukaan informasi publik. "Karena arsip ini sangat memegang peranan dalam akuntabilitas kinerja kita," tambah Andi. Beliau pun berharap bahwa kegiatan ini menjadi salah satu ajang memperpanjang kemitraan ANRI dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang sudah terbangun sebelumnya. (TK)

# ANRI RAIH PELAYANAN PUBLIK TERBAIK VERSI OMBUDSMAN



Ruang Layanan Arsip

**JAKARTA, ARSIP** - Akhir-akhir ini paradigma mengenai posisi publik sebagai “customer” menjadi perhatian berbagai instansi pemerintah. Publik/ masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari aparat pemerintah selaku pelayan masyarakat. Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah tersebut juga telah dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 bab 1 UU N. 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk memberikan

pelayanan publik yang baik, beberapa instansi pemerintah meningkatkan fasilitas yang digunakan dalam melayani masyarakat. Pandangan terhadap posisi masyarakat berubah, tidak sekedar sebagai obyek tetapi sebagai subyek layanan. Pelayanan kepada masyarakat merupakan upaya yang tidak terpisahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Data dari beberapa survey yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat dengan ditandai oleh pelayanan publik yang tidak transparan, diskriminatif, berbelit-belit, korup dan sebagainya.

Semua kondisi ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas penyelenggara pelayanan publik yang belum mampu mengubah pandangannya tentang pelayanan publik, belum dipenuhinya standarisasi pelayanan dan rendahnya partisipasi masyarakat

Agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, maka harus ada yang memperhatikan implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 oleh instansi pemerintah, sehingga ada kontrol dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun perorangan, yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah). Oleh sebab itu, Ombudsman melaksanakan penilaian kepatuhan instansi pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Menjelang akhir tahun 2013, ombudsman melakukan penilaian terhadap 36 (tiga puluh enam) lembaga, baik Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Non Struktural.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dikatakan bahwa, asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Berdasarkan asas tersebut, maka variabel yang digunakan oleh Ombudsman untuk menilai kepatuhan adalah Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, Unit Pengaduan, Sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, Visi, Misi dan Moto, Sertifikat ISO 9000:2008, Atribut, dan Sistem Pelayanan Terpadu. Dengan demikian, nilai yang diperoleh oleh lembaga yang dinilai dibagi ke dalam 3 (tiga) zonasi kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:

1. Zona merah atau kepatuhan rendah ( 0 – 500 ) : Zona merah menggambarkan kepatuhan yang rendah dari penyelenggara perizinan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Zona kuning atau kepatuhan sedang ( 501 – 800 ) : Zona kuning menggambarkan kepatuhan yang sedang terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



Sarana pencarian arsip berbasis IT

3. Zona hijau atau kepatuhan tinggi ( 801 -1000 ) : zona hijau menggambarkan kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bagi Lembaga yang diteliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kepatuhan lembaga dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lembaga bersangkutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan bagi Ombudsman RI, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan koordinasi antara Ombudsman RI dengan lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Hasil penilaian kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap 36 lembaga pemerintah menjelang akhir tahun 2013, menunjukkan bahwa 6 lembaga masuk dalam zona merah, 20 lembaga masuk dalam zona kuning, dan 10 lembaga masuk dalam zona hijau. Dalam penilaian tahun 2013, ada 10 lembaga yang masuk dalam zona hijau, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Konsil

Kedokteran Indonesia (KKI), BPOM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Banding Merek, Komisi Banding Paten, Badan Pusat Statistik, LAPAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. ANRI berhasil memperoleh nilai tertinggi, artinya, tingkat kepatuhan ANRI terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tinggi. Hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras ANRI guna mewujudkan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Kepuasan publik menjadi tolak ukur dalam melakukan intropeksi terhadap pelayanan yang diberikan kepada publik. ANRI telah melengkapi fasilitas yang memudahkan dan membuat nyaman publik sebagai “user” dari arsip. Mulai dari penyediaan buku inventaris manual yang lengkap, pencarian cepat arsip dengan menggunakan sistem, sampai dengan fasilitas khusus bagi ibu hamil dan “disable” person. Kejelasan informasi mengenai biaya copy arsip dan waktu yang dibutuhkan dalam pencarian arsip juga telah terpampang dalam ruang baca arsip. Kotak kritik dan saran juga telah disediakan sebagai umpan balik dari “user” arsip. Semua ini dilakukan ANRI demi memberikan yang terbaik bagi publik. Semoga. (SS)



**KUNJUNGI...**  
**GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT**

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:  
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film  
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB





# UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke website [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh file "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format (PDF)* dan dapat dibaca menggunakan software Adobe Acrobat